

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Selasa 5 November 2024
Wilayah	Kota Makassar



Serapan Anggaran Pemkot Masih 56 Persen

Serapan Anggaran Pemkot Masih 56 Persen

■ Setara dengan Belanja Daerah Rp2,96 Triliun

MAKASSAR, UPEKS—Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih rendah jelang akhir tahun ini. Realisasi belanja daerah Pemkot Makassar masih berada di angka 56 persen.

"Realisasi belanja 56 persen," kata Muh Dakhlan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Senin (4/11/2024).

Di mana, realisasi serapan anggaran 56 persen tersebut setara dengan belanja daerah Rp2,96 triliun. Tahun ini, total belanja daerah Pemkot Makassar sebesar Rp5,29 triliun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.

Menurut Dakhlan, Pemkot Makassar terus berupaya memaksimalkan percepatan be-

lanja daerah. Dengan upaya percepatan, realisasi belanja daerah diharapkan bisa mencapai 70-80 persen pada akhir tahun nanti.

Realisasi yang masih minim jelang akhir tahun memang sebetulnya terjadi setiap tahun. Sebab, sebagian besar belanja daerah atau pembayarannya dilakukan pada akhir tahun.

Pembayaran dari sejumlah kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sesuai dengan kontrak pekerjaan yang juga berakhir akhir tahun.

"Seperti ini memang akhir

tahun yang banyak proses pencairan karena kontraknya di akhir tahun selesai," kata Dakhlan.

Karena itu, Dakhlan optimis realisasi serapan anggaran akan terus meningkat signifikan pada akhir tahun ini. Pasalnya, sejumlah kegiatan yang dengan yang besar akan dibayarkan pada akhir tahun ini.

Percepatan serapan anggaran juga menjadi perhatian dari Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis.

Arwin menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) lingkup Pemkot Makassar guna melakukan percepatan serapan APBD-P 2024.

Ia meminta seluruh OPD mempersiapkan program kegiatan masing-masing secara matang mulai dari perencanaan.

"Jangan sampai terlalu lama pada administrasi sehingga serapan anggaran terganggu yang di khawatirkan pelayanan publik juga terganggu," tekan Arwin.

Karena itu, ia mengimbau agar seluruh OPD menyajikan dokumen yang rapi, lengkap dan tertib yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga bertujuan dalam rangka menyambut entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, dokumen administrasi yang rapi, lengkap dan tertib akan memudahkan kerja Inspektorat dan BPK agar tidak terlalu berat.

Selain itu, Arwin juga memberikan perhatian dalam tindak lanjut temuan dari BPK sebelumnya. "Dengan begitu diharapkan Pemkot Makassar tetap mempertahankan Opini WTP," kata Arwin. (rul/hms)